

Kesimpulan: *Timor Lorosae 500 tahun*

oleh Geoffrey C. Gunn

Funu Timor

Sementara historiografi nasionalis Timor-Leste cenderung menjelaskan konflik di Timor selama 400 tahun terakhir sebagai perang perlawanan menentang kolonialisme, pada saat yang sama adalah salah jika konsep orang pribumi tentang bertempur dipinggirkan. Setidak-tidaknya kita harus memiliki pemahaman tentang bagaimana *funu* diingat atau secara aktif dikonstruksikan oleh orang Timor melalui berbagai tahap perjuangan mereka.

Kita telah berkali-kali menyebutkan kualitas ritual *funu* Timor bahkan ketika konflik berlangsung pada dimensi anti-*malai*, dan malahan juga dimensi anti-pajak. Tetapi dapatkah suatu pendekatan yang mengatropologiskan apa yang sepertinya tampak sebagai tanggapan rasional terhadap tekanan-tekanan dan kekejaman kolonialisme dari luar mengurangi pemahaman kita mengenai bagaimana orang Timor berperang? Bisakan pendekatan seperti itu mengaburkan ciri proto-nasionalis pemberontakan-pemberontakan tertentu? Atau, apakah pendekatan yang terlalu memperhatikan pecahnya kekerasan kehilangan inti

masalah, dalam mengkaji tindakan yang telah biasa dan umum terjadi seperti tidak patuh dan menghindar, memperlambat, berpura-pura, dan bentuk-bentuk protes tanpa kekerasan lainnya yang dibahas oleh James C. Scott dalam bukunya yang diberi judul yang tepat sekali, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (Senjata Kaum Lemah: Bentuk-bentuk Sehari-hari Perlawanan Petani), walaupun dalam konteks Asia Tenggara yang lain dan berhubungan dengan tatanan pasca kolonial.¹ Seperti yang ditunjukkan oleh pengkajian ini, dalam waktu yang lama dan melalui berbagai generasi orang Timor membuktikan diri sangat pakar dalam mengambil agama para penakluk mereka, membayar *finta*, bersumpah setia kepada mahkota [kerajaan Portugis], membayar pajak kepala, dan menjalankan kerja wajib, yang merupakan *non plus ultra* dari strategi pembangunan kolonial yang berhasil, hanya untuk mengacau strategi-strategi yang dibuat Portugis, dan, seperti dibahas di bawah, Indonesia yang menggantikannya. Bagaimana dan mengapa orang Timor begitu mampu membalik meja terhadap para penakluk mereka, untuk waktu yang sangat lama itu tidak mudah dijelaskan tetapi untuk memperjelas pertanyaan ini kita harus berpaling pada penjelasan-penjelasan antropologis dan historiografis.

Sementara kita telah memperluasnya untuk menjelaskan dimensi anti-*finta* dari pemberontakan pribumi di Timor, pada saat yang sama kita tidak boleh mengabaikan apa yang oleh banyak pengkaji problematika ini disebut dimensi mesianis atau milenarian dari protes orang pribumi. Seperti yang telah lama ditulis

¹ James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, Yale University Press, 1985, halaman 298-304.

oleh Robert Redfield dalam satu esai klasik, para antropolog secara khas menjumpai “kreativitas masyarakat yang terdisintegrasi dalam bentuk gerakan-gerakan nativistik.” Tetapi bahkan dalam menanggapi dampak orang luar, “rangsangan gagasan-gagasan baru, agama-agama baru, dan kopsepsi-konsepsi etis baru,” tidak semua korban menerima cara-cara si penakluk tanpa perlawanan. Peristiwa-peristiwa ini biasanya memiliki ciri-ciri magis atau shamanistik, dan sering mengungkapkan nama seorang nabi atau pemimpin dan suatu kerajaan mitis.²

Jadi, sementara unsur-unsur tidak rasional dari perang para *doidos* tidak mempengaruhi Portugis, seringkali bahwa ledakan itu menyelubungi logika pribumi alternatif, setidaknya seputar pembuatan-solidaritas bersama terhadap satu musuh bersama. Memang unsur mesianis dalam protes publik adalah satu tema yang berulang bahkan dalam sejarah modern Timor. Seperti yang dikemukakan oleh pakar etnologi Portugis Duarte dalam monografinya tentang Atauro, ketika dalam bulan Maret 1961 empat kapal perang Indonesia memasuki pelabuhan Dili dalam suatu kunjungan resmi, penduduk beragama Protestan di desa nelayan memandangnya sebagai pertanda dekatnya kemerdekaan mereka, suatu gerakan yang oleh Duarte dikaitkan dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh keuntungan palsu tertentu atau mesiah.³ Tidak kurang, magis, animisme, adat, agama Kristen dan keikutsertaan dalam Partai Komunis Indonesia menjadi tema-tema yang saling terjalin dalam gerakan *makdok* di Timor barat dan Solor pada

2 Robert Redfield, *The Primitive World and its Transformations*, Cornell University Press, Ithaca/New York, 1953, halaman 80-81.

3 Jorge Barros Duarte, *Timor: Ritos e Mitos Atauros*, Ministério da Educação, Lisboa, 1984, halaman 17-18.

1965-1966 yang bertepatan dengan pembantaian di pulau-pulau ini beberapa ribu orang anggota partai komunis dan musuh-musuh lain oleh militer Indonesia dan orang-orang yang mereka tipu.⁴

Unsur mesianis juga muncul dalam gerakan Santo António, suatu gerakan keagamaan-mistik-revivalis Katolik yang mendapatkan banyak pengikut di kawasan Dili pada 1988. Gerakan ini, yang dipercaya diam tidak bergerak, muncul dalam perhatian penulis pada 1993 dalam bentuk seorang laki-laki berjaga-jaga di luar kediaman Administrator Apostolik Dili. Orang ini, yang sepertinya setengah kesurupan atau agak gila, berjanggut lebat dan berkulit gelap mengesankan sebagai seorang *topasse* atau, lebih mungkin orang keturunan Bidau atau Sica. Ia menyapa penulis dengan bahasa Portugis dan bahasa Indonesia logat setempat berganti-gantian. Intervensinya – sebagian adalah permohonan untuk masa depan Katolik dan kemerdekaan pulau ini – juga muncul dalam bentuk gambar kasar simbol-simbol keagamaan dan politik yang dituliskan dalam sejenis bahasa Melayu Portugis, yang dia ingin agar disampaikan kepada Uskup, suatu janji yang saya pegang dengan seorang uskup-antropolog di Australia.⁵

Juga benar bahwa di bawah kekuasaan militer Indonesia yang menindas, orang Timor berpaling secara besar-besaran kepada gereja, yang merupakan satu-satunya lembaga yang mampu memberikan perlindungan. Dalam kasus manapun

4 R.A.F. Paul Webb, "The Sickie and the Cross: Christian and Communists in Bali, Flores, Sumba and Timor, 1965-67," *Journal of Southeast Asian Studies*, 17, No. 1, March 1986.

5 Tanpa membuang kesempatan, penguasa Indonesia di Dili bertindak menindas sekte ini sebelum kunjungan Presiden Indonesia Soeharto (*New Straits Times*, 12 Desember 1988).

kepercayaan dan praktek animis sangat mendapat cap jelek dalam hukum Indonesia, karena itu faktor keamanan ada dalam tindakan masuk salah satu dari lima agama yang resmi diakui negara. Sementara para pengikut sekte-sekte Protestan juga bertambah besar di bawah kekuasaan Indonesia, masuknya agama Islam melalui puluhan ribu imigran dari Jawa dan Sulawesi tidak hanya datang untuk mendominasi perekonomian bazaar tetapi juga mengubah komposisi agama di Timor. Tragisnya, ini membawa pada meledaknya kekerasan yang tak pernah terjadi sebelumnya pada dasawarsa 1990-an yang sebagian terdorong oleh agama tetapi bukan tanpa warna ekonomi dan warna defensif lainnya. Tahun 1996-1997 saja terjadi bentrokan kekerasan di Viqueque (oleh orang setempat lawan *agent provocateurs* yang dilatih Indonesia), di Pante Macassar melawan pendatang Bugis, dan bentrokan-bentrokan yang tak terjadi sebelumnya melawan pendatang Muslim di Kefamenanu, Timor barat.

Tetapi antara kutub penaklukan dan perlawanan, ada pengertian besar bahwa perang di Timor adalah proses sangat ritual di luar pengalaman Portugis, Belanda, atau para pengganti mereka, setidaknya sampai mereka melakukan upaya untuk mempelajarinya. Seperti yang ditegaskan oleh buku ini, hanya melalui pemahaman tentang aspek ritual dari *funu* maka hampir setengah milenium perlawanan Timor memiliki arti.

Pengertian bahwa dua antagonis Eropa di Timor mencapai pemahaman dan akomodasi awal dengan bentuk-bentuk lokal peperangan telah dicatat oleh

Dampier. Tentang perang tidak langsung gaya Belanda, ia mengamati, *Cupangayans* atau sekutu-sekutu pribumi Belanda diberi perintah untuk “membunuh semua yang mereka jumpai dan membawa Kepala mereka dalam Kemenangan.” Ia juga mengamati satu bangunan besar di Kupang yang dibangun untuk menyimpan kepala-kepala orang Portugis (atau *topasse?*). “Sehingga ketika Portugis mengancam menyingkirkan Belanda keluar pulau ini, Belanda, tanpa banyak mengucapkan kemarahan, mengambil kepala-kepala mereka secepat mungkin.” Dalam catatan yang tajam yang ditujukan kepada Belanda, atau dalam sorotan yang jarang semangat pencerahannya, ia berkomentar, “Saya tidak tahu Dorongan apa yang mereka miliki bagi Ketakmanusiawian mereka.”⁶ Perasaan ini digemakan oleh Crawford yang, dalam esainya mengenai “Art of War” [Seni Perang] menyampaikan contohnya sendiri mengenai seorang gubernur Belanda di Makassar yang memiliki kebiasaan menerima satu keranjang kepala musuh sebagai hadiah yang berharga. Dalam pengkajiannya tentang peperangan di Jawa, Bali, Borneo dan Sulawesi, Crawford memusatkan pada beberapa ciri penting, termasuk senjata, karakter militer dari despotisme, cara memajaki pasukan, cara menyatakan perang dan mengorganisasikan pasukan militer, cara bertempur, perbekalan, dan khususnya perlakuan terhadap orang mati.⁷

Dalam semua itu, Crawford dan mungkin semua orang dari generasinya, akan sepakat bahwa ada dua gaya utama peperangan, cara kaum biadab yang memperlakukan orang mati dengan kemarahan, dan cara orang beradab, dengan

6 William Dampier, *A Voyage to New Holland: The English Voyage of Discovery to the South Seas in 1699*, Alan Sutton, Gloucester, 1981, halaman 185.

7 John Crawford, *History of the Archipelago*, Edinburgh, 1820, halaman 219-50.

standar yang lebih tinggi atau setidaknya standar yang lain. Ini tidak mengatakan bahwa metode-metode peperangan itu sama di seluruh kepulauan atau bahkan sama sepanjang masa. Seperti peringatan Anthony Reid, sebagaimana penggambaran tentang model-model perilaku “tradisional” harus disikapi dengan hati-hati, begitu pula seharusnya peperangan, khususnya kalau teknologi militer adalah yang pertama dipinjam.⁸

Tetapi sementara orang Aceh, Melayu, dan Bugis telah mengadopsi kanon kuningan bahkan sebelum kedatangan orang Barat, menonjol bahwa senjata ini tidak ada dalam gudang senjata Timor. Sementara Senobai dan Luca, misalnya, menyamai raja-jara Asia Tenggara lainnya dalam hal kemampuan mereka untuk mengerahkan tenaga kerja manusia untuk mengolah tanah, orang Timor yang bersenjata tombak, busur, panah, dan sumpit kalah ketika harus mempertahankan diri menghadapi orang Barat yang datang dengan kapal laut tetapi juga kalah menghadapi orang-orang Makassar atau Bugis. Menurut perkiraan Freycinet, jumlah orang yang bersenjata di Timor, termasuk mereka yang menggunakan senjata api genggam cukup besar pada abad kedelapabelas. Belos, menurut perhitungannya, mengerahkan 40.000 prajurit di antaranya 3.000 orang bersenjata senapan, selebihnya bersenjata pedang, perisai, lembing, dan busur dengan panahnya. Vaikenos (Servião) mengerahkan 25.000 orang bersenjata, termasuk 2.000 orang bersenjata senapan. Karena alam yang lebih menguntungkan di bagian barat pulau ini, kavaleri bersenjata lebih dikembangkan dengan baik.

⁸ Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce: Volume One: The Lands Below the Winds*, Yale University Press, New Haven and London, 1988, halaman 121-122.

Pasukan berkuda bahkan ada yang bersenjata pistol sederhana.⁹

Tetapi meskipun senjata api diadaptasi, metode-metode militer dan ketentuan perilaku masih dilakukan dalam cara yang telah lama dihormati. Bahkan pertempuran besar yang terakhir pada abad ini di Timor, suatu sebutan bagi upaya gagal Boaventura, adalah pertahanan yang sangat “tradisional,” mengharumkan pertempuran Cailaco 200 tahun sebelumnya, meningkat dari *pedras* menggunakan suatu gabungan persenjataan pribumi dengan senapan api abad kesembilanbelas. Sementara tidak kekurangan heroisme, pertahanan yang gagal ini pasti tidak bisa menandingi angkatan bersenjata abad keduapuluh. Ini adalah spekulasi yang menarik, tetapi bahkan *topasse*, golongan pertama yang mengadaptasi dengan sukses pelatuk senapan dan pemuat moncong senapan, sepenuhnya kalah ketika berhadapan dengan teknologi serta organisasi angkatan laut dan militer tingkat yang lebih tinggi yang dimulai pada awal abad yang lalu, dengan pengerahan serdadu *Sepoy* yang dipimpin perwira Eropa dan, kemudian, senjata api yang menembakkan peluru dengan cepat dan kapal-kapal perang yang digerakkan dengan mesin bertenaga uap.

Satu orang lagi yang berusaha memahami akar-akar peperangan di Timor adalah Gubernur de Castro, walaupun sebagian penggantinya keberatan. Menulis pada tahun 1860, ia memandang konflik itu ada di mana-mana di kalangan orang Timor, sebagian didorong oleh sikap tidak campur tangan yang umum dari pihak

⁹ L.C.D. de Freycinet, *Voyage autour du monde, exécuté: sur de corvettes S.M. l'Uranie et la Physicienne pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820, Historique du Voyage*, Tome I, Paris, 1827, halaman 710.

Portugis dalam masalah-masalah *reinos*. Secara khusus, de Castro menyebutkan kesalahan pada penculikan orang (untuk dijadikan budak), pencirian binatang atau pengambilan tanah, yang diperumit oleh tidak jelasnya batas antara *reinos*. Sementara mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dengan baik itu ada di antara *reinos*, khususnya jika mereka bersekutu, sebaliknya jika yang bersengketa berasal dari *reinos* yang bermusuhan. Dalam kasus tersebut, jika utusan yang dikirim ke pengadilan *reino* lawan kembali dengan tangan kosong, persiapan untuk berperang segera dilakukan. Kemudian suatu kontrak dibuat dengan calon-calon sekutu atau *vassaumanes* menawarkan ganti rugi berupa kerbau atau emas kepada calon korban perang. Dalam *jeux de mort* ini, dua pihak akan melibatkan *taux* atau utusan dalam suatu perjumpaan ritual sebelum terlibat dalam pertempuran. Pertempuran, tulis de Castro, terdiri dari penembakan sejumlah tembakan pada jarak yang jauh. Sementara pertempuran sering berlangsung satu bulan dalam satu masa, pertempuran ini baru berhenti jika salah satu pihak secara mematikan terkena bola meriam. Kepala musuh akan dipotong oleh pihak yang menang dan kedua belah pihak akan mundur sampai orang yang mati dikuburkan, selanjutnya pertempuran pun dilanjutkan. Perang akan selesai dengan direbutnya desa lawan, yang dijarah, dan dihancurkan sampai menjadi abu. Orang yang hidup akan lari ke hutan seperti binatang sementara tawanan akan dibunuh atau, kalau dibiarkan hidup, dijadikan budak. Tetapi jika perang pecah antara kerajaan-kerajaan dan pemerintah, lanjut de Castro, masalahnya kebanyakan akan sama karena tidak ada yang pernah bisa mengumpulkan pasukan yang cukup di Timor untuk menghukum pemberontak.¹⁰

10 Affonso de Castro, "Résumé Historique de l'Établissement Portugais à Timor, des us et coutumes de ses

Menulis pada tahun 1844 mengenai hubungan antara adat, takhayul, dan perang di Timor untuk pembaca di Macau, pejabat Portugis José dos Santos Vaquinas mengungkapkan kengerian ketika mengetahui bahwa *tabedae* atau pemenggalan kepala musuh oleh pihak yang menang di Timor mencakup banyak syair yang menyebut nama Raja Portugal dan Timor. Baginya, ini dan adat yang lain menegaskan keyakinan “menggelikan” dari rakyat yang menelusuri nenek-moyangnya sampai pada *lulik* buaya.¹¹ Seperti yang ditulis Osório de Castro pada 1908, sama dengan orang Dayak di Kalimantan, *tabedae* adalah adat di Timor sejak zaman yang tak bisa diingat lagi. Dari nara sumbernya, Sena Barreto, kepala bea cukai Dili, penulis ini juga mempelajari jeritan “menderita” yang disebut *lorca* bersama dengan tarian *batuque* yang “sedih dan biadab” yang ditampilkan oleh perempuan yang berkelompok setengah lingkaran memainkan gendang-gendang berbentuk kerujut dan gong-gong Melayu. Sena Barreto, yang hubungannya baik dengan *régulo* tertentu, termasuk beberapa yang sudah mengikuti pendidikan di Macau, menyaksikan anak-anak muda membawa pulang kepala-kepala manusia dari medan perang, ini kemungkinan adalah setelah berakhirnya salah satu ekspedisi Gubernur Celestino da Silva. Setelah itu kepala-kepala ini menjadi *lulik* yang ditempatkan di tumpukan batu karang atau bahkan dipancangkan di pohon-pohon.¹²

Pélissier menjawab persoalan ini dengan tepat pada hasil dari

Habitants,” *Tijdschrift voor Indische Taal-Land-en Volkenkunde*, Vol. II, 1862, halaman 465-506.

11 Jose de Santos Vaquinas, “Estudos Sobre Macau,” *O Macaense*, Vol. II (91): 195, 10 de Janeiro de 1884.

12 Alberto Osório de Castro, *A Ilha Verde e Vermelha de Timor*, Cotovia, Lisboa, 1996, halaman 137-39.

pengkajiannya: “la guerre pour ou contre les autorités est également une entreprise magico-religieuse hautment speculative.” Secara khas, seperti yang kita lihat dalam banyak pemberontakan, suatu persekutuan *reinos* bertahan terhadap permusuhan dalam mencari kepala untuk memenuhi keinginan para dukun, meninggalkan trofi-trofi yang mengerikan itu untuk menghiasi desa-desa mereka yang dilindungi perbentengan. Persoalan bagi Portugis selalu adalah bagaimana mengetahui yang mana dari para *liurai* yang bisa diandalkan dan yang mana yang melawan dengan darah tuntutan negara dalam bentuk *finta* atau tenaga kerja.¹³

Sementara kita telah berbelok menarik perhatian pada gaya *funu* Timor, yang juga mencakup praktek-praktek tertentu yang bisa secara longgar disebut “perburuan kepala manusia,” kita juga mengindikasikan bahwa praktek ini dilakukan secara luas di seluruh kepulauan ini. Salah seorang antropolog modern yang telah meneliti persoalan ini di kalangan suku Salu Mambi, satu kelompok etnis di Sulawesi selatan, mengemukakan bahwa perburuan kepala manusia jarang dibahas dalam kepustakaan kolonial dari segi konteks politik dominasi dan subordinasi, tetapi dibahas dari segi kepercayaan, betapapun membingungkannya. Dalam mencari makna dari tindakan ini, penulis ini menyatakan bahwa perburuan kepala manusia oleh suku Salu Mambi bisa ditafsirkan sebagai suatu “ritual perlawanan” terhadap serangan oleh pedagang budak dan orang luar yang datang dari seberang lautan. Untuk sebagian, aspek perayaan dari ritus ini – *tabedae* di Timor – bisa ditafsirkan sebagai suatu katarsis kolektif. Sementara klaim seperti itu telah dibuat untuk suku Igorot di Luzon [Filipina], kita masih belum punya

13 Pélissier, *Timor en Guerre*.

pengkajian yang baik tentang persoalan ini dalam hubungannya dengan Timor. Lagi pula, bagaimana ritual *tabedae* di Timor beradaptasi dalam beberapa dasawarsa setelah berakhirnya praktek memenggal kepala. Di sini, saya menolak menyatakan “penindasan”, karena saya tidak bisa menemukan undang-undang atau statuta tertulis yang merupakan suatu pelarangan definitif atau penindasan. Sama dengan Salu Mambi, bagaimana orang Timor “mengatur ingatannya sendiri” tentang praktek-praktek ini – konstruksi pribumi tentang kekerasan – khususnya dengan adanya stigmatisasi yang dikaitkan dengan agama-agama yang tidak diakui di Indonesia sekarang ini.¹⁴ Akankah *tabedae*, bersama dengan ciri-ciri budaya Timor di luar sekte-sekte yang disahkan pemerintah, menjadi merosot semata sebagai tontonan wisatawan seperti di tempat-tempat lain di kepulauan ini yang dikuasai Indonesia?

Sementara tidak ada ambiguitas yang mengitari proyek kolonisasi Indonesia terhadap Timor-Leste, baik dari sudut ekonomi atau ideologi, apakah Portugal benar-benar memperlakukan Timor lebih sebagai protektorat daripada koloni? Ini adalah pertanyaan yang penting karena berada di jantung pemerintahan dan hubungan kuasa antara Portugis, penguasa setempat, dan bahkan para pengganti mereka. Kita telah menegaskan bahwa, secara antropologis, Timor termasuk golongan masyarakat tersegmentasi di kepulauan bagian timur. Gagasan Hindu-Buddha dan Islam tentang negara tersentralisasi dan konfigurasi hubungan kekuasaan bertipe *mandala* tidak dikenal di Timor. Bahkan gagasan tentang satu

14 Kenneth M. George, *Showing Signs of Violence: The Cultural Politics of a Twentieth-Century Headhunting Ritual*, University of California Press, Berkeley, 1996.

kerajaan Wehale yang bersatu harus disikapi dengan sangat hati-hati. *Raja* atau penguasa-penguasa kecil dengan siapa para padri Dominican pertama kali berurusan, yang terbaik harus dipandang sebagai pusat kekuasaan yang sangat lokal. Arti penting mereka bagi orang luar, apakah orang Jawa, Cina atau Portugis berasal dari kemampuan mereka untuk menjadi perantara perdagangan cendana antara kawasan pantai dengan pedalaman. Tetapi sebagai *rei* atau *reino* dalam orbit Portugal raja-raja kecil memindahkan kesetiaan simbolis mereka kepada seorang Raja yang sangat abstrak. Meskipun bendera Portugis – simbol dari ikatan kesetiaan dan kepatuhan simbolis ini – juga secara sempurna dipribumikan dalam bentuk permukaan *lulic, rei* yang terpilih juga menerima kedudukan bawahan dan berpangkat di dalam koloni-protectorat melalui penerimaan gelar-gelar kehormatan dan militer Portugis. Sementara kita telah menyaksikan bagaimana, dari mulai Gubernur Castro, prinsip tidak campur tangan hanya tertulis di atas kertas, jelas bahwa pemberontakan Boaventura dan hasilnya mempercepat berakhirnya kekuasaan *liurai* sebagai garis keturunan yang tak terputus. Selanjutnya, dalam perspektif Wallerstein, perkembangan perekonomian perkebunan di Timor itu terkait dengan ekspor suatu barang dagangan yang banyak jumlahnya ke pasar dunia yang sesungguhnya – inti Eropa – mengakhiri kegunaan kawasan Timor-Flores sebagai pos perdagangan barang-barang konsumsi mewah. Betapapun, pada pertengahan abad kesembilanbelas, titik penghubung utama perdagangan cendana Timor, yaitu Macau, tidak lagi menjalankan peran perantara pembayar upeti yang klasik dalam perdagangan Cina, suatu fungsi yang dijalankan Cina setelah dimasukkan dalam sirkuit

imperialisme Barat.¹⁵ Tetapi apakah perubahan revolusioner dalam perekonomian regional ini menandai peminggiran klasik Timor dalam perekonomian dunia? Jawabannya sebagaimana tergantung pada tingkat inkorporasi Timor. Kita telah membahas bagaimana pemberlakuan penanaman kopi di pulau ini, dari perspektif fiskal lokal, telah menyelamatkan perekonomiannya ketika produksi cendana sedang memasuki kemerosotan yang relatif lama. Tetapi penyelamatan ini masih tidak berarti dari segi ekonomi kolonial modern, fakta kehidupan ekonomi yang disebabkan oleh kedudukan pinggiran Timor dalam suatu kawasan kegiatan kapitalis-kolonial yang menyaksikan kapital Inggris, Belanda, dan Prancis, seiring sejalan dengan pekerja imigran yang dikerahkan pada kawasan-kawasan ekstraksi utama. Berbeda dengan koloni-koloni yang dikuasai langsung, termasuk koloni-koloni pemukim Angola dan Moçambique, Timor, suatu pangkalan lautan, sama dengan tempat-tempat terbelakang atau kawasan-kawasan terpencil seperti Laos Prancis atau, di dunia Portugis, Guinea, dimana bentuk-bentuk lokal kekuasaan perupetian melemahkan mode produksi kolonial, dan belakangan, kapitalis-kolonial.

Tetapi apakah Timor hanyalah contoh lain dari imperialisme bukan ekonomi?¹⁶ Tentang pertanyaan ini kita sependapat dengan Pélissier yang menyatakan bahwa, bahkan dalam generasi sebelum Gubernur Celestino da Silva

15 Immanuel Wallerstein, *The Modern World System III: The Second era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840s*, Academic Press, San Diego, 1989, halaman 132.

16 Ini adalah tesis yang diajukan oleh Clarence-Smith dalam kaitan dengan Angola bagian selatan. Secara khas, dalam keadaan “imperialisme bukan ekonomi,” defisit anggaran yang parah, kemiskinan alamiah, dan perlawanan militer yang efektif rakyat menyebabkan besarnya pengeluaran tanpa hasil selaiian kejayaan kekuasaan kolonial. W.G. Clarence-Smith, *Slaves, Peasants and Capitalists in Southern Angola 1840-1926*, Cambridge University Press, Cambridge, 1979, halaman 3-4.

tiba, tidak dapat diingkari bahwa perkembangan terjadi meskipun mengikuti jalan “bentrok pedang dan kilatan cahaya desa-desa yang dimakan api.” Bahkan seperti Timor Belanda, dimana politik tidak campur tangan sampai abad ini membiarkan pedalaman tidak tersentuh, Timor Portugis menonjol dalam hal terciptanya perekonomian ekspor berdasarkan kopi.¹⁷ Berbeda dengan Belanda yang secara sengaja menyebarkan sangat sedikit sumberdaya mereka di pulau-pulau bagian timur, Portugis, meskipun tidak memiliki ketrampilan finansial dan teknis yang unggul seperti pesaing-pesaingnya, mampu memusatkan militer dan sumberdaya lainnya di bagian pulau Timor yang mereka kuasai. Sementara perkembangan penuh perekonomian perkebunan berdasarkan ekspor kopi menebar benih penyelamatan bagi koloni yang melarat dan menawarkan jalan bagi masa depan yang secara ekonomi mandiri, faktor-faktor luar tertentu sekali lagi menahan perkembangan ini, suatu sebutan bagi keberlanjutan kekuasaan turun-temurun dan kemampuan para *liurai* yang bermusuhan untuk menghisap anggaran pembangunan yang sangat kecil yang karena itu disalurkan untuk penaklukan atau kegiatan yang berhubungan dengan militer.

Kalau semua hal tetap sama, bisa diharapkan bahwa pada pertengahan abad, dengan perkembangan perekonomian perkebunan dan elitnya yang baru muncul, Timor akan bergabung dengan gelombang bangsa-bangsa merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, dalam beberapa hal, kehancuran karena pendudukan Jepang menimbulkan keinginan kembali ke masa lalu yang paling

¹⁷ René Pélissier, *Timor en Guerre: Le Crocodile et les Portugais (1847-1913)*, Pélissier, Orgeval, 1996, halaman 73.

mendalam dalam kebudayaan Timor, yang secara drastis menarik mundur rencana kolonial yang terbaik, menghidupkan kembali pengaruh tradisi dan hubungan-hubungan kuasa lokal. Timor berdiri sendirian di kalangan negeri-negeri Asia Tenggara dalam hal perang tidak menumbuhkan gerakan nasionalis. Jepang tidak berhasil mendorong munculnya suatu kontra-elit di Timor seperti di tempat-tempat lain di Asia Tenggara yang didudukinya. Tetapi negara Salazaris juga tidak memberikan kemungkinan itu. Sementara angin topan revolusi Indonesia menyapu negeri bekas koloni itu, pengaruh peristiwa di tetangga Timor yang raksasa ini juga mengena secara tidak langsung. Sementara kita kekurangan dokumentasi, pemberontakan Viqueque 1959 membawa gema tesis ini, yang lebih diperlihatkan oleh pengkhianatan APODETI mengikuti Indonesia pada 1975, menggelorakan kesetiaan kesukuan dan memicu kembali *funu* tanpa henti khususnya di distrik-distrik perbatasan Timor.

Tetapi di Timor, jauh dari dampak penghancuran kapital kolonial yang mengenyahkan bentuk-bentuk produksi pribumi, seperti yang kita amati tentang cara produksi komunitas, adalah kegagalan gereja dan negara untuk mengubah penduduk sesuai dengan cetakan mereka – pajak kepala dan proyek kerja wajib – yang, secara keseluruhan, menyumbang pada dominannya dampak pelestarian dan inkorporasi walaupun lemah. Kasusnya berbeda dengan petani-proletariat yang tercerabut dari akarnya di Jawa dan Sumatra yang bergabung dalam perjuangan komunis pada pertengahan 1920-an dan sementara kasusnya juga berbeda dengan proletariat Angola dan Moçambique pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an, tidak

ada bukti tentang aksi-aksi berbasis kelas atau kegiatan pemogokan di Timor Portugis, dengan perkecualian kecil pemogokan-pemogokan oleh pelajar dan pekerja pemerintah di Dili pada tahun-tahun akhir kekuasaan Portugis. Oleh karena itulah program FRETILIN berbicara dalam bahasa yang dikenal dengan sangat baik oleh orang Timor, nasionalisme atau sekurang-kurangnya pertahanan budaya terhadap orang luar.

Epilog: Invasi dan Perlawanan

Dari catatan kapal *Afonso de Cerqueira*, salah satu dari dua kapal korvet Portugis yang bersandar di Atauro pada 7 Desember 1975, pada pukul 04.30 hari itu “tujuh kapal terbang pelan (helikopter) terlihat di kejauhan.” Pada pukul 04.45 kapal-kapal dengan “lampu-lampu yang tersembunyi” memulai “pemboman” ke arah Dili, yang berlangsung sampai pukul 05.30. Pada pukul 05.10 “dilakukan kontak sonar yang lemah” (dengan kapal-kapal selam). Sangat awal pagi sebuah perahu layar Amerika, diyakini sebagai “antena” lokal Amerika Serikat yang mendengarkan peristiwa tersebut menyelinap diam-diam dari tambatannya di korvet *João Roby*. Pada pukul 06.00 sebuah kapal terbang pengintai dan satu kapal pendarat yang besar terlihat mengarah ke Ponta Tibar, di sebelah barat Dili, dimana mereka mendarat. Berita-berita tentang invasi segera dikirimkan ke Kepala Staf Angkatan Laut Portugis, Gubernur Macau, dan Presiden Republik. Komando yang diterima adalah agar menanggapi hanya jika diserang. Tetapi pada tengah hari pada hari yang sama, pihak yang berwenang di Lisboa memerintahkan kapal-kapal korvet tersebut untuk mengangkut pemerintah Portugis termasuk

gubernur dan pasukan parakomando elit untuk mengundurkan diri dari perairan wilayah ini dan tetap berada di luar jarak dua belas mil.¹⁸

Seperti yang kemudian diketahui, atau yang Amerika Serikat ingin agar diketahui, prospek suatu Cuba kedua di Asia Tenggara akan menjadi penghalang bagi jalur kapal selam nuklir melalui Selat Ombai-Wetar. Tidak ada keraguan bahwa pemikiran itu adalah yang paling tinggi di benak Presiden Amerika Serikat Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger, pada saat pertemuannya dengan Presiden Soeharto di Jakarta pada malam hari sebelum invasi, suatu tindakan yang pasti mereka dukung.¹⁹

Dimulailah Operasi Seroja, invasi skala penuh dan pencaplokan Indonesia terhadap Timor-Leste. Pada tanggal 4 Desember, tiga hari sebelum kejadian ini, José Ramos-Horta baru saja diangkat menjadi Menteri Urusan Luar Negeri dalam pemerintah pertama Timor-Leste. Atas permintaan Lisboa, Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat pada 22 Desember untuk membahas invasi Indonesia, yang secara aklamasi mengadopsi resolusi menyerukan kepada semua negara untuk menghormati: kesatuan wilayah Timor-Leste, hak rakyatnya atas penentuan nasib sendiri sesuai dengan hukum PBB, dan penarikan mundur segera pasukan tentara Indonesia. Ini adalah yang pertama dari sepuluh resolusi PBB mengutuk

18 Serafim Lobato, "Invasion of Timor: The US 'Antenna'", *Expresso*, 10 June 1995 (aslinya dalam bahasa Portuguese).

19 Mengenai kunjungan Kissinger ke Jakarta, dan laporan tentang arti penting strategis Selat Ombai-Wetar, lihat Gunn dengan Lee, *A Critical View of Western Journalism and Scholarship on East Timor*, JCA Press, Manila, 1994, halaman 124-127.

pendudukan dan pencaplokan oleh Indonesia, meskipun semuanya diabaikan.²⁰ Sementara PBB terus menganggap Portugal bertanggungjawab sebagai penguasa administratif di wilayah ini sampai dilakukannya tindakan penentuan nasib sendiri yang diakui internasional, dan sementara Portugal terus memperjuangkan hak ini untuk rakyat Timor di PBB dan badan-badan lain, terdapat perasaan yang tak kunjung hilang bahwa sepanjang tahun-tahun Perang Dingin, negara-negara Barat yang berkepentingan, AS, Inggris, Jepang dan Australia, bersekongkol mendukung invasi ilegal Indonesia terhadap wilayah ini dan, bersama dengan mitra-mitra Indonesia di ASEAN, menghalangi dengan kuat upaya-upaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan – terutama orang Timor-Leste di diaspora dan para pendukung mereka – untuk mengaktifkan keterlibatan PBB dalam menyelesaikan masalah ini. Strategi membiarkan Indonesia menelan wilayah ini tanpa campur tangan luar berguna bagi kepentingan-kepentingan Barat sampai titik tertentu – Indonesia tetap merupakan pembeli besar senjata Barat, rekan perdagangan dan bisnis yang besar dari AS, sementara kepentingan bisnis dan ekonomi Jepang-Indonesia di kepulauan ini nyaris saling menguntungkan. Pada pihaknya, Australia gembira dengan keberuntungan membagi minyak Timor dengan Indonesia yang merupakan sekutu pertahanan barunya, suatu rujukan pada Perjanjian Celah Timor tahun 1989 dan Perjanjian Pertahanan Australia-Indonesia Desember 1995 yang rahasia.

Sekalipun demikian, strategi memanjakan diktator yang terbukti anti-komunis itu ada batasnya, bukan selalu karena opini liberal di Barat, tetapi karena

20 Lihat Geoffrey Gunn, *East Timor and the United Nations*, Red Sea Press, Trenton, New Jersey, 1997.

berakhirnya Perang Dingin membuat Marcos, Noriega, dan Mobutu tidak lagi relevan, atau setidaknya tidaknya memalukan. Tak perlu dikatakan lagi, situasi setelah Perang Dingin yang menyaksikan pembalikan luar biasa peruntungan negara-negara seperti Namibia, Eritrea, Afrika Selatan di bawah sistem *apartheid*, negara-negara Baltik dan Eropa Timur telah membangkitkan harapan rakyat-rakyat di sedikit negeri yang berkasus dekolonisasi di PBB. Walaupun begitu, Timor-Leste tetap merupakan sengketa yang terlupakan bahkan berbeda dengan Sahara Barat dan Palestina dimana PBB melakukan intervensi di lapangan, dan berbeda dengan Moçambique dan Angola dimana intervensi PBB telah menyelamatkan negara-negara yang terpecah itu.

Dalam kasus Timor-Leste, perlu kejadian yang sangat kejam untuk membangkitkan pendapat umum internasional, yaitu pembantaian di kuburan Santa Cruz bulan November 1991, yang dibahas di bawah. Tetapi sekalipun peristiwa ini membuat keadaan di Timor-Leste menjadi naik dalam penulisan editorial dan berita utama, proses PBB masih saja tersandera kelambatan dan kelambanan prosedural.²¹ Dan demikianlah ketika Belanda meninggalkan sekutu-sekutu Baratnya memprotes pembantaian Dili, Indonesia membuktikan kemampuannya untuk mencari tempat lain untuk mendapatkan kredit internasional. Dalam keadaan meningkatnya jalan buntu di Uni Eropa, dalam mana Portugal memiliki hak veto, pengumuman oleh komite Nobel Norwegia pada tahun 1996 tentang pemberian Hadiah Nobel yang bergengsi kepada dua putra Timor-Leste juga harus dianggap sebagai peristiwa yang mengubah secara

21 Lihat *A Critical View*.

berarti pendapat tentang persoalan Timor-Leste.

Tetapi tidak ada keraguan bahwa bagi orang Timor-Leste biasa, peristiwa-peristiwa global itu jauh dan abstrak. Bagi mereka, “perang tersembunyi” Indonesia di Timor-Leste dilancarkan di luar penglihatan media Barat, dan bahkan diselubungi dari PBB yang tidak pernah menjalankan kehadiran pemantauan yang permanen di wilayah ini. Tragedi Timor ialah bahwa kekerasan yang dilancarkan terhadap bangsa yang sedang lahir pada hari pertamanya oleh invasi Indonesia terus berlangsung sampai hari ini. Dari buku riwayat hidup yang terus-terang seorang jenderal Indonesia yang paling berkepentingan dengan perencanaan invasi di lapangan, Jenderal Moerdani, kita mengetahui bahwa invasi gabungan udara-laut pada 7 Desember – yang digambarkan oleh seorang jurnalis Australia sebagai salah satu operasi pasukan payung terbesar setelah Perang Dunia II – sangat kacau dengan korps marinir Indonesia mengalami kerugian besar dalam manuver yang membingungkan, akibat “tembakan dari teman” sebelum FRETILIN mengungsi meninggalkan ibukota. Sehari kemudian Moerdani terbang ke Dili dalam kapal terbang ringan dengan tujuan mengambil dokumen-dokumen FRETILIN dan memastikan pembebasan orang-orang yang akan menjadi kolaborator Indonesia yang ditangkap FRETILIN.²² Tuduhan-tuduhan tentang FRETILIN menyiksa tawanan UDT, dan tuduhan-tuduhan yang masih diulangi oleh para jurubicara Indonesia tentang “trauma perang saudara yang masih melekat” tidak ada apa-

²² Julius Pour, *Benny Moerdani: Profile of a Soldier Statesman*, Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, 1993, halaman 316-344. Rincian tentang invasi pasukan payung yang terganggu juga dimuat dalam kesaksian peristiwa-peristiwa yang belum lama diterbitkan oleh seorang kamerawan Indonesia yang menyertai pasukan invasi Indonesia [Hendro Subroto, *Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur*]. Lihat David Jenkins, “Death in Dili: 22 Years On”, *Sydney Morning Herald*, 16 Oktober 1997.

apanya dibandingkan banjir darah yang ditimbulkan oleh tentara Indonesia yang menyerbu di ibukota, menghabisi 80 persen penduduk laki-laki kota itu, yang banyak dari mereka ditembak secara sistematis dengan darah dingin di pelabuhan Dili. Dalam kekejaman ini, yang umumnya dilakukan oleh Batalyon Lintas Udara 502, orang-orang Cina secara khusus dipilih untuk dibunuh. Begitu pula jurnalis dan saksi Barat terakhir atas invasi ini, Roger East, setelah pembunuhan di Balibo pada Oktober terhadap lima orang Australia dan Inggris awak televisi oleh pasukan Indonesia yang sedang menyerbu. Pembantaian diulangi di kota-kota lain yang diyakini dihuni oleh FRETILIN disusul dengan penjarahan besar-besaran. Pada tanggal 10 Desember dengan pasukan payung Indonesia mendarat di Baucau, 15.000 orang tentara menambah pasukan invasi yang berkekuatan 10.000 orang. FRETILIN saat itu terdiri dari 2.500 tentara reguler dari bekas tentara Portugis dengan 7.000 milisia paruh waktu dan 20.000 orang tentara cadangan. FRETILIN juga mendapat simpati dari penduduk desa dan satu jaringan pedalaman yang telah dipersiapkan. FRETILIN juga mengadakan hubungan radio dengan pendukung mereka di Australia meskipun pagar penjagaan angkatan laut Indonesia dan persetujuan diam-diam Australia efektif mencegah FRETILIN untuk mendapatkan dukungan moral dari luar.²³

Sebelum Soeharto menyatakan Timor Timur sebagai “provinsi terbuka” pada tahun 1988, yang dengan demikian membuka jalan bagi masuknya imigran Indonesia secara tak terbatas, dan – untuk kepentingan mempromosikan kesan

²³ John G. Taylor, *Indonesia's Forgotten War: The Hidden History of East Timor*, Zed, London, 1991, halaman 93.

normal – masuknya wisatawan, meskipun dengan pengamatan yang ketat, setengah pulau ini mengalami pengucilan dari dunia luar yang hanya disamai oleh tempat-tempat seperti Tibet dan Korea Utara. Satu-satunya perkecualian terhadap karantina informasi ini adalah kunjungan terkontrol oleh para simpatisan yang dikenal dan rombongan mereka. Akan tetapi dengan kedatangan pengungsi-pengungsi pertama dari Timor-Leste ke Portugal pada tahun 1976, gambar yang lebih lengkap tentang luasnya tragedi ini mulai muncul, meskipun dipandang dengan skeptisisme yang besar oleh media dunia dan ibukota negara-negara Barat. Walaupun demikian, suara yang lain di dalam media Barat mulai muncul dari kalangan jurnalis yang menyertai kunjungan delegasi asing ke Remexio, yang pada bulan September 1978, mereka menyaksikan pemandangan orang kelaparan yang mereka gambarkan sebagai “lebih parah daripada Biafra.” Sebelum pengunduran dirinya pada bulan Mei 1983, Dom Martinho da Costa Lopes, saat itu Administrator Apostolik Dili, juga berhasil mengirimkan pesannya ke dunia luar, terutama yang mengungkapkan bahwa sebab-sebab kelaparan itu terkait erat dengan upaya kejam Indonesia untuk mengendalikan dan memindahkan penduduk. Tetapi dimulai pada periode 1979-1980 laporan-laporan yang mengerikan sampai di dunia luar dari gereja dan sumber-sumber lain tentang pembantaian-pembantaian terhadap para pendukung FRETILIN di tempat-tempat seperti pelabuhan Dili, pantai Areia Branca, dan Quelicai. Yang paling terkenal adalah pembantaian penduduk sipil di desa Kraras dekat Viqueque pada bulan Agustus 1983.²⁴

24 *Ibid.*, halaman 100-110.

Tetapi tragedi Timor-Leste masuk dalam kesadaran Barat, hanya di gereja yang paling pinggiran atau penerbitan-penerbitan sayap kiri. Memang sejauh bahasa “hak asasi manusia” memasuki perbendaharaan konstituensi politik di Barat, kritik terhadap kediktatoran sayap kanan dipandang sebagai reaksi dari sayap kiri dan sangat dicurigai. Dengan kata lain, sistem intimidasi, teror, pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, dan kamp-kamp tawanan yang dijalankan oleh militer dipandang sebagai biaya “yang diperlukan” untuk mendukung Orde Baru Indonesia, penjamin terbaik bagi stabilitas di kawasan dimana ketidakstabilan menjadi suatu klise. Sementara debat mengenai Indonesia setelah pembantaian Santa Cruz bergeser pada penghentian atau pembatasan bantuan dan latihan militer untuk angkatan bersenjata Indonesia, kita sekarang mengetahui bahwa kenyataannya hubungan militer dengan Jakarta justru diperkuat, antara lain oleh Australia dan secara rahasia dilanjutkan oleh Amerika Serikat, yang bahkan tidak diketahui oleh Kongres Amerika Serikat. Barat tidak pernah menghentikan dukungan kepada kediktatoran Suharto yang telah 32 tahun berkuasa, malahan menimbuni dengan pujian dan sanjungan kepada Orde Baru Indonesia yang ekonominya pragmatis. Tetapi sementara sebelum terpilih menjadi Presiden AS, Bill Clinton menyebut tindakan Indonesia di Timor-Leste “tidak adil,” skandal “Lippogate” tahun 1996 mengungkapkan bahwa jaringan bisnis Suharto bisa tanpa mendapat hukuman membeli pengaruh di Washington. Bahkan dengan pemahaman yang diperoleh dari penumbangan rezim Marcos dan, yang lebih baru, rezim Mobutu, Barat melihat tidak adanya alternatif untuk kekuasaan otoriter di Indonesia. Penghantaman kejam oleh militer terhadap tokoh oposisi

utama Indonesia Megawati Sukarnoputri pada tahun 1995 tidak membuat turunnya keteguhan Barat untuk mendukung kediktatoran Suharto. Bahkan persoalan pertanggungjawaban kebakaran luas yang merusak hutan Kalimantan pada tahun 1998 tidak merusak kekuasaan Suharto di mata para kreditor luar negeri. Baru krisis keuangan Asia yang besar pada 1997-1998 yang mengungkapkan kerentanan “kapitalisme pertemanan” Indonesia, tetapi saat itu bahkan negeri yang paling berkepentingan secara ekonomi dan paling terkena krisis ekonomi Indonesia, Jepang tidak mengaitkan paket penyelamatan ekonomi dengan reformasi politik. Dan juga, pengunduran diri “dramatis” Suharto pada 21 Mei 1998 tidak terjadi karena penarikan dukungan ekonomi dan politik dari Jepang dan Barat, tetapi lebih disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dipertahankan yang timbul dari anarki perkotaan, tindakan-tindakan militer yang lepas kendali, tantangan “kekuatan rakyat” yang sedang bangkit, merosotnya dukungan elit, dan pengangkatan licik seorang pengganti sipil, meskipun didukung militer, B.J. Habibie yang dipandang bisa diterima oleh Barat.

Sampai belakangan ini, Indonesia masih menyatakan bahwa empat partai politik mendeklarasikan integrasi Timor-Leste dengan Indonesia pada tanggal 29 November 1975, satu hari setelah pernyataan kemerdekaan sepihak FRETILIN. Deklarasi integrasi, yang dikatakan dibuat di Balibo oleh enam orang pemimpin APODETI, UDT, KOTA, dan Trabalhista, oleh Indonesia disebut “Deklarasi Balibo.” Meskipun dokumen ini kemudian ditolak oleh sejumlah penandatanganannya, dan tidak diakui oleh PBB sebagai bagian dari proses

dekolonisasi, Indonesia masih menyatakannya sebagai dokumen yang merupakan “pernyataan kehendak sejati seluruh rakyat Timor Timur.” Kenyataannya, seorang akademisi Jepang Akihisa Matsuno mengungkapkan bahwa setidaknya ada empat versi naskah dokumen ini dan versi yang tanpa tandatangan yang disampaikan kepada PBB telah mengalami perubahan besar, yang terutama adalah dihapuskannya bagian dari dokumen asli, pernyataan yang salah bahwa Portugal menyetujui pernyataan kemerdekaan sepihak FRETILIN. Matsuno menyimpulkan bahwa, atas dasar bukti internal ini, para perancang dokumen mendapatkan informasi intelijen yang salah. Penghapusan kedua dalam versi PBB adalah Belanda. Sementara dokumen asli dengan tepat mencatat pemisahan dua bagian pulau ini masing-masing karena kolonialisme Portugis dan Belanda, versi yang dikoreksi berbicara tentang 400 tahun pemisahan Timor bagian timur dari Indonesia, suatu pemisahan yang dilakukan oleh Portugal. Matsuno mengamati bahwa sementara argumen yang pertama bisa juga digunakan untuk membenarkan penyatuan Timor timur dan barat tanpa menyebutkan Indonesia sama sekali, dalam analisis terakhir, argumen tentang kesatuan mistis ini lebih berguna bagi klaim Indonesia atas “kembalinya Timor Timur ke pangkuan ibu pertiwi.” Juga, komentar Matsuno, dokumen yang diserahkan kepada PBB berbicara tentang “kemerdekaan dan integrasi” Timor Timur ke dalam Indonesia, sementara rancangan asli hanya berbicara tentang “integrasi.”²⁵

Meskipun demikian, menarik bahwa pada tahun 1997 dalam sebuah

²⁵ Akihisa Matsuno, makalah disampaikan pada Simposium ke-6 tentang Indonesia dan Timor-Leste, Lisboa, 21-26 Maret 1995. Untuk “versi PBB” atau versi yang disampaikan kepada PBB, lihat *Decolonization in East Timor*, Department of Foreign Affairs, Republic of Indonesia, March 1977, halaman 82.

pernyataan kepada Komite Dekolonisasi PBB yang mendesak dikeluarkannya persoalan Timor-Leste dari agenda Komite, R.M. Marty Natalegawa dari Indonesia menyampaikan pendapat bahwa rakyat Timor-Leste telah menjalankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri “lebih dari dua puluh tahun yang lalu sesuai dengan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan,” suatu proses “yang disaksikan oleh rombongan diplomat asing dan wakil-wakil media internasional.” Dalam kasus ini, Natalegawa tidak menyebut Deklarasi Balibo tetapi kata-kata Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Timor Timur yang dibentuk Indonesia, suatu badan beranggotakan 37 orang, yang dipilih secara “musyawarah dan mufakat,” yang pada tanggal 31 Mei 1976 “bertindak menjalankan keinginan rakyat seperti yang diungkapkan dalam proklamasi Integrasi Timor Timur pada tanggal 30 November 1975, di Balibo” mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk “menerima dan mengesahkan” integrasi wilayah ini. Kenyataannya, ini adalah peristiwa yang disaksikan oleh sejumlah kecil diplomat dan jurnalis asing yang bertugas di Jakarta. Setelah merekayasa status politik Timor-Leste dan seperti lupa pada isi ketentuan resolusi-resolusi PBB, Indonesia saat itu mengundang Sekretaris Jenderal PBB dan wakil Komite Dekolonisasi untuk mengunjungi Timor-Leste. Keduanya menolak pergi dari New York ke Dili yang diduduki, dengan mengutip resolusi-resolusi PBB yang berlaku mengikat. Indonesia jelas menolak dengan kasar tetapi tidak tergerak. Akan tetapi bobot resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB tidak menggentarkan Presiden Indonesia Suharto untuk menandatangani Undang-Undang No. 7/1976 pada 17 Juli 1976 tentang “pengesahan integrasi Timor Timur ke dalam negara kesatuan Republik

Indonesia dan pembentukan Provinsi Timor Timur.”²⁶

Sementara Australia dan AS melangkah jauh dengan mengakui integrasi *de facto* dan *de jure* Timor-Leste ke dalam Republik Indonesia, secara bohong mereka tidak menyetujui metode inkorporasinya. Sama halnya, sementara menyatakan dekolonisasi Timor-Leste sudah lengkap, dan sementara dengan efektif menerapkan *cordon sanitaire* informasi dan akses atas separuh pulau ini, Indonesia tidak hanya menyingkirkan jurnalis yang akan melakukan penyelidikan, tetapi pada puncak kelaparan besar-besaran, secara efektif melarang masuk organisasi-organisasi non-pemerintah dan pada saat yang penting bahkan melarang Palang Merah Internasional. Lebih lanjut, pada 1996-1997 sementara berbasa-basi mengenai seruan PBB untuk “solusi yang diterima internasional,” Indonesia menolak kehadiran permanen Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Indonesia atau Timor-Leste. Tetapi dengan menyetujui pada tahun 1983 untuk mengikuti pertemuan-pertemuan yang disponsori PBB antara menteri luar negeri Indonesia dan Portugal, Indonesia memanfaatkan rapat-rapat ini untuk menjamin bahwa tidak ada yang dilakukan untuk menangani persoalan di lapangan.

Di sini bukanlah tempatnya untuk menjelaskan sebab-sebab mengapa PBB terbukti tidak berpengaruh pada Timor-Leste atau mengapa negeri-negeri seperti Amerika Serikat menerapkan standar ganda untuk kasus Timor-Leste bersama

²⁶ S.R. Roff, *Timor's Anschluss: Indonesian and Australian Policy in East Timor*, The Edwin Mellen Press, Lewiston, 1992, halaman 95-128. Lihat pula, *Decolonization in East Timor*, halaman 83-95. Lihat petisi penulis kepada United Nations Special Committee on Decolonization, 1475th meeting, 16 June 1997, AG/COL/129.

dengan, misalnya, invasi Iraq terhadap Kuwait. Cukup dikatakan bahwa berakhirnya Perang Dingin bersama dengan perubahan pendapat umum di Barat mengenai integritas rezim Suharto dalam hal demokratisasi, hak asasi manusia, korupsi dan nepotisme keluarga presiden, telah membuka jendela baru kesempatan bagi para pendukung penentuan nasib sendiri Timor-Leste. Dalam hal ini sistem PBB telah reaktif, setidak-tidaknya sampai pengangkatan pada akhir 1996 Sekretaris Jenderal yang sekarang, Kofi Annan, yang bertindak cepat mengangkat Wakil Khusus PBB untuk Timor-Leste yang pertama dengan tugas menemukan suatu “jalan keluar yang cepat.”

Ini tidak berarti bahwa Indonesia tidak punya kolaborator di dalam Timor-Leste. Tak diragukan lagi melalui politik hadiah dan hukuman Indonesia telah berhasil membangun kader pendukung di dalam wilayah ini. Sebagai penerima manfaat yang besar dari kredit Barat dan Jepang, Indonesia pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an bisa menyediakan anggaran pembangunan yang jauh lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan Portugal pada awal dasawarsa 1970-an, meskipun hampir bangkrutnya perekonomian Indonesia pada tahun 1998 membuat persoalan ini dipertanyakan. Lagi pula, para pengamat mencatat bahwa bagian yang besar dari anggaran pembangunan telah disalurkan untuk mendukung apa yang hanya bisa disebutkan sebagai skema rekayasa sosial yang dirancang untuk mengintegrasikan Timor-Leste secara fisik dan mental dengan Indonesia. Inilah yang menjelaskan pengutamaan pada pembangunan jalan, yang sesungguhnya melayani tujuan pemberantasan pemberontakan, pengerahan

pasukan tentara, dan seperti disebutkan di atas, imigrasi ke dalam wilayah ini. Tak perlu dikatakan lagi bahwa biaya ekologis eksploitasi ekonomi sumberdaya alam Timor-Leste itu sangat parah.²⁷ Bahkan perluasan besar infrastruktur pendidikan di Timor-Leste bisa dipandang menjalankan tujuan politik, yaitu memenangkan hati dan pikiran pemuda yang berbahasa Indonesia. Tetapi untuk memahami mengapa mereka yang mengikuti sekolah Indonesia ternyata menjadi yang paling tidak menyetujui kekuasaan Indonesia dan mengapa pemuda Timor-Leste sekarang muncul sebagai pendukung dekolonisasi yang tak bisa digantikan, kita harus memberikan fokus pada dinamika pendudukan militer dan perlawanan terhadapnya.

Mungkin terlihat menyimpang, bahkan merugikan perjuangan kemerdekaan Timor-Leste, bahwa perlawanan bersenjata berlanjut di gunung-gunung yang jauh di ujung timur. Tetapi kehadiran mereka bisa dimengerti jika kita memandang gerilya yang tersisa ini sebagai ekor dari pasukan FRETILIN yang kalah, para penerus Deklarasi Kemerdekaan Sepihak November 1975, sebagaimana penting untuk memahami mengapa dan bagaimana kesepakatan menyerah oleh perlawanan sangat mungkin oleh mereka dipandang sebagai bagian dari paket perdamaian yang menyeluruh untuk Timor-Leste yang terkait dengan demiliterisasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Sejauh ini, Indonesia menolak penyerahan “bersyarat” yang ditawarkan oleh kaum gerilyawan. Di sisi

²⁷ Dampak Indonesianisasi Timor-Leste dari segi produksi pertanian, kemandirian ekonomi, pemindahan pemukiman secara paksa, dan lingkungan diuraikan dengan baik oleh akademisi Indonesia yang berada di pengasingan George Aditjondro, *In the Shadow of Mount Ramaleu: The Impact of the Occupation of East Timor*, INDOC, Leiden, 1995.

lain, dengan menyebut perlawanan bersenjata “komunis” atau mulai 1980-an ketika penyebutan ini tidak lagi menguntungkan, sebagai “gerakan pengacau keamanan” (GPK) dan, lebih belakangan ini, dalam upaya untuk menghindari kritik yang semakin meningkat tentang buruknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh ABRI, sebagai “teroris,” Jakarta berupaya membenarkan kehadiran militernya yang sangat berlebihan di wilayah ini. Bagaimanapun, bagi banyak orang Timor, keberhantaran FALINTIL (Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste – Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional Timor-Leste), sayap bersenjata FRETILIN, dalam keadaan yang sulit itu bersifat sangat simbolis dan, seperti dikemukakan buku ini, merupakan bau harum dari *funu* nenek-moyang mereka melawan orang luar.

Seperti yang belum lama ini dikisahkan oleh seorang gerilyawan FALINTIL, dari bulan Juni sampai November 1978 Indonesia melancarkan operasi penghukuman “pengepungan dan pemusnahan total” yang menyerang dengan bom-bom biasa dan bom-bom napalm terhadap gerilyawan dan penduduk setempat, terutama di tempat-tempat seperti gunung Matebian. Bulan Desember 1978 Presiden FRETILIN Nicolau Lobato, yang menggantikan Xavier do Amaral (tertangkap), dibunuh di suatu tempat di sebelah selatan Dili. Bulan Maret 1981, dengan tamatnya generasi pertama pemimpin FRETILIN, para gerilyawan memilih Xanana Gusmão sebagai pemimpin mereka dan membentuk CNRM (Conselho Nacional da Resistência Maubere – Dewan Nasional Perlawanan Maubere). Tetapi datang lagi yang lebih buruk berupa Operasi Keamanan, suatu

serbuan militer yang luar biasa kejam dalam mana ABRI melibatkan orang Timor dalam operasi “pagar betis” yang dirancang untuk menghancurkan perlawanan bersenjata.²⁸ Taylor telah memaparkan bagaimana FRETILIN berhasil pulih pada tahun 1983, meskipun setelah mengalami serangan Indonesia yang sangat menyakitkan dan menghancurkan. Dalam tahun itu, sejalan dengan strategi baru Xanana, sejumlah komandan militer Indonesia mulai merundingkan penghentian tembak-menembak dengan FRETILIN yang berpuncak pada perjanjian gencatan senjata antara Xanana mewakili pihak perlawanan dengan Kolonel Purwanto, komandan militer Indonesia di Timor Timur. Di dalam Timor-Leste, gencatan senjata ini meringankan beban pada pihak pejuang gerilya dan penduduk, di luar negeri membantu Indonesia untuk menyampaikan tindakan ini sebagai salah satu dari kebaikan hatinya, khususnya kepada seorang delegasi Australia yang berkunjung. Tak perlu dikatakan, gencatan senjata ini segera berakhir dengan pengumuman sepihak oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal Moerdani tentang satu operasi militer baru, yang diberi nama Operasi Persatuan, untuk menghantam perlawanan “tanpa ampun,” yang mengerahkan lima belas dari dua puluh batalyon yang saat itu berada di Timor-Leste ke arah timur dengan tujuan menangkap Xanana Gusmão dan komandan-komandan lainnya.²⁹

Dalam upaya untuk menerobos jalan buntu dan memajukan sisi politik

28 Paulino Gama (Mauk Moruk), “The War in the Hills, 1975-85: A Fretilin Commander Remembers,” dalam Peter Carey dan G. Carter Bentley (penyunting), *East Timor at the Crossroads: The Forging of a Nation*, Cassell, London, 1985, halaman 97-105.

29 Taylor, *Indonesia's Forgotten War*.

perjuangan, gerakan ini lebih lanjut berkembang pada tahun 1986 dengan terjadinya kesepakatan bersejarah oleh FRETILIN dan UDT untuk menyingkirkan perbedaan masa lalu dan membentuk satu front persatuan dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan. Di bawah kesepakatan *Convergência* (Konvergensi), Xanana Gusmão menempatkan dirinya di atas FRETILIN sebagai kepala CNRM, sementara FALINTIL mengubah dirinya menjadi Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional.

Pada titik ini militer Indonesia merekayasa penggantian Dom Martinho Costa Lopes. Penggantinya, Carlos Ximenes Belo, seorang pastor muda kelahiran Timor-Leste terbukti tidak sepatuh seperti yang dibayangkan militer. Selain dengan teguh menempatkan gereja sebagai pelindung orang Timor yang menjadi korban militer, Uskup Belo menulis surat-surat gembala membela hak asasi manusia dan hak budaya, dan menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB pada bulan Februari 1989 meminta diselenggarakannya sebuah referendum. Dalam keadaan meningkatnya jalan buntu antara gereja dan militer, keterlibatan Vatikan dalam pembelaan hak keagamaan dan identitas budaya, meskipun bukan hak politik, memasukkan faktor baru dalam persamaan, mengarah pada pengumuman pada bulan Maret 1989 bahwa Sri Paus akan mengunjungi Timor-Leste. Sementara memberikan bobot propaganda kepada negara Indonesia, jelas bahwa perlawanan, atau setidaknya-tidaknya pusat perlawanan baru di kota, dengan sukses membalikkan meja ke arah Indonesia. Bukannya kunjungan Paus tidak diatur dengan seksama. Kunjungan ini diatur dengan baik. Tetapi peristiwa ini juga

meningkatkan harapan pemuda Timor-Leste bahwa kunjungan ini akan membuka jendela kesempatan untuk melakukan protes di hadapan tokoh dunia ini dan rombongan pers bahwa hak-hak mereka telah diinjak-injak, bahwa penentuan nasib sendiri mereka telah diingkari, dan bahwa pengasingan mereka dari struktur-struktur yang ditegakkan militer itu benar-benar lengkap. Bahkan sebelum kunjungan Sri Paus, seperti yang diingat oleh salah seorang pemimpin protes, Constâncio Pinto, dalam bukunya yang terbit tahun 1997, *East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance*, pemuda di sekolah berbahasa Portugis terakhir yang tersisa yang diperbolehkan Indonesia di Dili telah membangun gerakan bawah tanah yang berhubungan dengan perlawanan bersenjata. Tak bisa diingkari, munculnya sebuah jaringan bawah tanah perjuangan kemerdekaan Timor-Leste di Timor-Leste dan di Jawa, yang mencapai orang-orang Timor-Leste di diaspora Portugal dan Australia telah menggeser fokus perjuangan dari gunung-gunung ke rakyat di kawasan perkotaan. Meskipun intimidasi meningkat, kelompok-kelompok aktivis heroik ini membuat pernyataan-pernyataan kemerdekaan, melancarkan perlawanan anti-Indonesia pada bobot dan dimensi yang baru.³⁰

Pergeseran ini menjadi jelas dalam serangkaian peristiwa yang mengarah pada apa yang kemudian dikenal sebagai pembantaian Santa Cruz atau pembantaian Dili, yang bersama dengan pemberian hadiah perdamaian Nobel, banyak berbuat untuk menempatkan persoalan Timor-Leste pada agenda

³⁰ Mathew Jardine dan Constâncio Pinto, *East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance*, South End Press, Boston, 1997.

internasional.

Tindakan ABRI mengarahkan senjata mereka kepada sejumlah orang yang berkumpul untuk berkabung-berdemonstrasi di kuburan Santa Cruz di Dili pada 12 November 1991 bukanlah penyimpangan, seperti yang dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Australia saat itu, tetapi sejalan dengan pola insiden-insiden yang sama di Indonesia dan Timor-Leste. Perbedaan dengan pembantaian ini adalah bahwa kejadian ini difilmkan oleh kamerawan asing yang, dalam situasi kesulitan yang besar dan risiko kehilangan nyawa, berhasil menyelundupkan film tersebut ke dunia luar dimana gambar-gambar penuh darah ditayangkan di layar televisi di ibukota-ibukota dunia. Sementara PBB dan pemerintah-pemerintah Barat cepat mengutuk pembantaian ini, para pendukung asing Indonesia juga menerima jaminan yang lunak bahwa para pelaku akan dihukum. Kenyataannya, sebaliknya yang terjadi, bukti kuat malah menunjukkan terjadinya pembantaian susulan dan penutupan lebih lanjut.³¹

Bagaikan pelipur lara kecil bagi 241 korban pembantaian ini yang tercatat dan “penghilangan” yang terjadi kemudian, untuk pertama kalinya perhatian media difokuskan pada perjuangan mereka. Bagaimanapun, pembantaian ini merupakan titik puncak tertinggi bagi gerakan bawah tanah berbasis kota. Di luar segalanya, demonstrasi ini timbul dari pembunuhan militer yang kejam terhadap seorang pemuda Timor-Leste di Gereja Motael, yang bersamaan dengan

³¹ Hal ini didokumentasikan dengan meyakinkan dalam buku dan film oleh John Pilger. Lihat *Distant Voices*, Vintage, London, 1994.

kekecewaan tertahan orang Timor-Leste terhadap penundaan kunjungan delegasi parlemen Portugis ke wilayah ini, merupakan bukti bahwa generasi yang bersekolah di bawah kekuasaan Indonesia menolak kekuasaan ini. Tetapi juga, persetujuan diam-diam Barat pada bujukan Indonesia menciptakan ruangan tambahan bagi Indonesia untuk meningkatkan penindasannya terhadap pusat-pusat perlawanan berbasis kota, dengan penyusupan, kooptasi, dan setelah 1995-1996 penggunaan agen-agen teror, yang dikenal sebagai kelompok Ninja. Keberhasilan strategi ini jelas sangat tinggi bagi Indonesia dengan tertangkapnya Xanana Gusmão di Dili pada November 1992 dan pengadilan sandiwara terhadapnya pada bulan Februari-April 1993 yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya – kemudian diubah menjadi kurungan penjara 20 tahun di Jakarta.

Tetapi pemenjaraan Xanana Gusmão juga problematis bagi Indonesia, tidak hanya karena Portugal mengaitkan pembebasannya dengan pemulihan hubungan diplomatik, tetapi juga karena berdampak terciptanya tokoh seperti Nelson Mandela dari pemimpin Timor-Leste ini. Sangat bermakna bahwa José Ramos-Horta, yang bertanggungjawab kepada Xanana Gusmão sebagai juru bicara keliling di luar negeri bagi CNRM, pergi menerima Penghargaan Nobel Perdamaian atas nama pemimpin Timor-Leste yang dipenjarakan itu. Sejak diterimanya penghargaan itu Xanana telah mendapat kunjungan di penjara dan dikonsultasikan oleh, antara lain, Utusan Khusus PBB untuk Timor-Leste dan Presiden Republik Afrika Selatan. Lebih belakangan, di sebuah konvensi yang diselenggarakan di Portugal, pada bulan April 1998, dalam satu gerak untuk

memperkuat persatuan dan menyusun satu visi untuk masa depan seputar Magna Carta Timor, orang-orang Timor di diaspora serta dari dalam negeri memilih Xanana Gusmão dan Ramos-Horta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Dewan Nasional Perlawanan Timor (Conselho Nacional da Resistência Timorese – CNRT), yang menggantikan CNRM.

Sementara itu, sepanjang 1994-1998, beberapa ratus orang muda Timor-Leste yang belajar di universitas-universitas di Jawa dan Bali mulai melancarkan “pendudukan” kedutaan negara-negara Barat di Jakarta, sebagian untuk mencari suaka politik atau mendapatkan “repatriasi” ke Portugal yang dimediasi Palang Merah Internasional. Pendudukan yang paling spektakuler adalah yang bersamaan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton ke Jakarta pada tahun 1994. Tetapi, sementara sentimen-sentimen para pencari suaka juga mendapatkan kekaguman dari sekelompok kecil kekuatan-kekuatan pro-demokrasi di Indonesia, baru setelah peristiwa dramatis di dalam negeri Indonesia bulan Mei 1998 kekuatan-kekuatan anti-Suharto dari kubu oposisi menyatakan solidaritas dengan perjuangan Timor-Leste. Memang sebelum kejadian ini sejumlah kecil intelektual Indonesia membelot dari kaumnya mempersoalkan persoalan Timor-Leste, yang merupakan suatu masalah manipulasi nasionalis, politik patronase, solidaritas Islam, ketidaktahuan yang berasal dari media yang dikontrol dan dimanipulasi, sangat jauhnya letak Timor-Leste bahkan di dalam kepulauan Indonesia, dan semata-mata – bahkan bagi orang Indonesia yang peduli – luasnya agenda prioritas-prioritas yang lebih mendesak dalam menangani kehidupan sehari-hari di

bawah kekuasaan otoriter.

Walaupun demikian, kemenangan taktis yang diperoleh kekuatan-kekuatan demokratis di Jakarta pada Mei 1998 membuka ruangan politik yang baru, meskipun terbatas, bagi rakyat Timor-Leste di bawah pendudukan Indonesia, seperti pelepasan narapidana-narapidana politik Timor-Leste yang dikurung di penjara-penjara di Indonesia, dan janji yang tak ditepati tentang penarikan mundur pasukan. Tetapi jelas bahwa tawaran “otonomi luas” yang disampaikan Presiden B.J. Habibie kepada Timor-Leste merupakan perubahan yang menentukan dalam sikap keras Jakarta. Sangat penting, tawaran ini ditanggapi oleh Utusan Khusus PBB Jamsheed Marker dalam bentuk suatu dokumen otonomi yang disusun rinci yang diperdebatkan dan didiskusikan oleh pihak Portugis dan Indonesia dalam serangkaian konsultasi, meskipun tidak ada pihak yang mundur dari sikap dasar masing-masing mengenai masalah kedaulatan. Juga sangat penting bahwa usulan otonomi menjadi bahan serangkaian diskusi “bebas” yang belum ada sebelumnya yang diselenggarakan di seluruh Timor-Leste antara Juni dan September 1998, di bawah bendera Dewan Solidaritas Mahasiswa, Pemuda, dan Pelajar Timor Timur, yang secara tidak resmi didukung oleh Marker dan secara luas dibiarkan oleh militer. Seperti yang disaksikan oleh penulis buku ini pada bulan Agustus 1998, rapat-rapat umum damai, seminar-seminar, dan diskusi-diskusi dihadiri oleh bermacam-macam golongan masyarakat, yang menyuarakan penolakan terhadap otonomi, sambil menyerukan demiliterisasi dan referendum yang diselenggarakan PBB.

Tetapi ketika diskusi-diskusi PBB tentang kesepakatan otonomi mengambil bentuknya, pada tanggal 27 Januari 1999 B.J. Habibie dengan dukungan Panglima ABRI Jenderal Wiranto mengejutkan para mediator PBB sekalipun, dengan mengemukakan bahwa jika Timor-Leste menolak “otonomi” maka wilayah ini bisa kembali ke status pra-1975 dan Portugal atau PBB bisa mengambil tanggungjawab dan memulai lagi proses dekolonisasi. Akan tetapi, secara terbuka pihak Indonesia menolak referendum, menegaskan bahwa hal ini akan menimbulkan perang saudara. Tetapi, dalam rencana ini, sekalipun rakyat Timor-Leste menolak otonomi, ini masih harus disahkan oleh parlemen Indonesia, badan yang “mengesahkan” pencaplokan wilayah ini. Tak perlu dikemukakan lagi bahwa pelepasan bersyarat Timor-Leste dari kekuasaan Indonesia menaikkan harapan dan kekhawatiran di dalam Timor-Leste, dan kalangan internasional, terutama karena menjadi jelas bahwa unsur-unsur angkatan bersenjata mempersenjatai milisi sejenis *contra* [satuan bersenjata yang dilatih, dipersenjatai, dan dibiayai oleh Amerika Serikat untuk melawan pemerintah revolusioner Nicaragua], membuka luka lama dan menebar benih perang saudara yang Indonesia mengaku tidak terlibat di dalamnya. Tetapi, pengumuman lebih lanjut oleh Habibie pada bulan Februari 1999 bahwa ia ingin melepaskan Timor-Leste pada 1 Januari 2000 meningkatkan harapan internasional pada titik ketinggian yang baru. Saat itu sedikit yang punya ilusi bahwa suatu konsultasi PBB yang adil dengan rakyat Timor-Leste akan menghasilkan keputusan selain kemerdekaan dan, ketika buku ini sedang dicetak, rakyat Timor-Leste dan masyarakat

internasional sedang menyelenggarakan persiapan darurat, seperti halnya sedikit orang yang memiliki ilusi tentang transisi yang mudah menuju kemerdekaan negara tanpa jaminan internasional.

Tetapi bagi rakyat yang budaya dan identitasnya berada dalam keadaan pemusnahan yang parah, “konsesi” seperti itu dari pihak pengganti Suharto memberikan hiburan kecil dalam keadaan tidak adanya demiliterisasi sejati termasuk penarikan mundur ABRI seperti yang diserukan oleh Uskup Ximenes Belo pada bulan Juni 1998. Juga jasa perlawanan Timor-Leste bahwa mereka melancarkan perjuangan defensif, sesuatu yang menjauhkan diri dari kekerasan dan teror, yang tak diragukan lagi sebagian besar karena pengaruh gereja. Perkecualiannya tentu saja adalah perlawanan bersenjata yang, untuk mempertahankan diri, menyasar militer Indonesia dan kolaborator dekatnya, meskipun bukan rakyat Timor-Leste. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang angkatan bersenjata Indonesia yang selalu punya waktu untuk mengarahkan senjata dan orang-orang bayaran mereka bahkan terhadap penduduk sipil Timor-Leste termasuk, yang sekarang didokumentasikan dengan penuh tekad, kaum perempuan Timor-Leste.

Meninjau kembali dua dasawarsa setelah pendudukan Timor Lorosae, nama sebutan dalam bahasa Tetun yang lebih disukai bagi setengah pulau ini yang disetujui oleh orang-orang Timor peserta pertemuan yang disponsori oleh PBB di Austria 1997, banyak pengamat yang terkejut – termasuk Komite Pemberian

Penghargaan Perdamaian Nobel Norwegia tahun 1996 – bahwa satu generasi yang disekolahkan oleh Indonesia berada di ujung tombak aksi-aksi yang bisa disebut secara berbeda-beda sebagai pertahanan budaya dan perjuangan kemerdekaan. Bukannya menerima identitas Indonesia, kekuasaan militer oleh orang dari luar tampaknya memperkuat identitas asli Timor seputar Tetun sebagai bahasa percakapan, walaupun dengan mengorbankan dialek-dialek lain. Tetapi sementara di zaman Portugis dipeluknya agama asing menjadi sama artinya dalam banyak hal dengan ketaklukan, begitu pula di bawah kekuasaan Indonesia penerimaan gereja Katolik dan pilihan oleh gereja pada tahun 1980 untuk menggunakan Tetun sebagai bahasa liturgi merupakan pertahanan primer terhadap penyusupan baru, baik secara militer maupun budaya. Jelas bahwa bahasa Camões telah kehilangan kedudukan dijadikan bahasa terlarang dalam program Indonesia untuk membudayakan ulang orang Timor sebagai orang Indonesia, tetapi bahkan hal yang sebaliknya tidak bisa dianggap lazim saja pada saat ketika rezim Orde Baru yang didukung Barat berada di tengah himpitan transisi dan dimana persoalan Timor berada pada tahap renegosiasi internasional yang terus meningkat.³²

32 Lihat Geoffrey Gunn, "Language, Literacy and Political Hegemony in East Timor," dalam David Myers (penyunting), *The Politics of Multiculturalism in the Asia/Pacific*, Northern Territory Press, 1995, halaman 117-123.